

**PROBLEMATIKA DUNIA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS MASA DEPAN BANGSA**

Ahmad Husin

Dosen Tetap STAI Kuala Kapuas

ahmadhusin901@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze problems in the world of education. The research method used is the study of literature or literature using secondary data sources collected through textbooks, e-books, scientific journals, news and so on. Testing data validity uses stages consisting of data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study show that the problem of the world of education experienced by both teachers and students. Some educational problems include education equity problems, education quality problems, educational efficiency problems, education elevation problems, curriculum problems, teacher role problems and overcoming them.

Keywords: problem, education, efficiency, revaluation

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam dunia pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui buku teks, e-book, jurnal ilmiah, berita dan lain sebagainya. Pengujian validitas data menggunakan tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika dunia pendidikan dialami baik oleh guru maupun siswa. Beberapa problematika pendidikan diantaranya masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan, masalah kurikulum, masalah peranan guru dan penanggulangannya.

Kata Kunci : Problematika, Pendidikan, Efisiensi, relevansi

PENDAHULUAN

Problematika atau problema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan dan permasalahan. Sedangkan pengertian dari masalah itu sendiri merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara kebutuhan dengan yang tersedia dan kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Perlu dipahami bahwa tidak semua permasalahan membutuhkan pemecahan masalah secara ilmiah, terdapat beberapa

masalah yang dapat dipecahkan dengan pendekatan non-ilmiah, seperti masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemecahan masalah dengan pendekatan non-ilmiah dapat menggunakan cara-cara seperti, 1) Dogmatis, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. 2) Intuitif, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau dipikirkan terlebih dahulu. 3) Spekulatif, coba-coba atau trial and error, cara tekaan, untung-untungan, yang temuannya berdasarkan kebetulan. 4) Otoritas Ilmiah, berdasarkan pendapat atau pemikiran logis para ahli dalam bidang tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI)

Menurut Dahlan dikutip oleh Maryam B. Gainan, dkk mengartikan pendidikan adalah upaya pedewasaan moral, sosial, dan ekonomi yang selayaknya dapat menghasilkan manusia yang memiliki pandangan dan pegangan hidup tertentu serta mampu membuat keputusan normatif dan mampu menjadi warga yang produktif serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bermasyarakat.

Problematika pendidikan dapat diartikan sebagai permasalahan yang terjadi dalam proses pedewasaan moral, sosial, dan ekonomi yang dilakukan dengan pola tingkah laku tertentu untuk menciptakan manusia yang bermoral dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam arti singkatnya, problematika pendidikan berarti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. (Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran)

Persoalan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Berbagai problematika muncul tidak hanya dalam permasalahan konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran saja, namun persoalan pelaksanaan pendidikan dari berbagai sistem di Indonesia juga turut serta menambah kompleksnya problematika pendidikan di Indonesia.

Sejak bergulirnya era reformasi, banyak kalangan terperanjat dengan problematika pendidikan yang ada di negara kita ini. Hal ini bermula dari penilaian banyak orang terhadap output hasil pendidikan di Indonesia yang belum sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemerosotan moral anak-anak bangsa, etos kerja yang kurang, keterampilan yang masih rendah, korupsi yang kian bertambah dan angka pengangguran dari kalangan intelektual (sarjana) dari hari ke hari angka statistiknya kian naik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kalangan pemerhati pendidikan di Indonesia, hingga berujung pada satu kesimpulan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan di negara

kita. Dan perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap masalah pendidikan di negara kita ini. (Ade Ismayani, Metodologi Penelitian 2020)

Dari uraian problematika di atas, penulis akan memfokuskan tulisan ini pada problematika pendidikan dari aspek pembelajaran, mengapa terjadi problem serta apa solusi yang bisa ditawarkan sebagai jalan keluar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui buku teks, e-book, jurnal ilmiah, dan sumber- sumber lain yang relevan sesuai dengan masalah dalam penelitian yaitu mengenai problematika dalam dunia pendidikan. Dalam menguji validitas data yaitu dilakukan analisis dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas, pertama karena sifat sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri, kedua karena usaha pendidikan harus mengantisipasi ke hari depan yang tidak segenap seginya terjangkau oleh kemampuan daya ramal manusia. Oleh karena itu, perlu ada rumusan sebagai masalah-masalah pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam mengemban tugasnya.

1. Permasalahan Pokok Pendidikan dan Penanggulangannya

Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat

kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, dan melibatkan banyak pihak.

Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:

- a) Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- b) Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.

a. Masalah Pemerataan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Terse Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada Bab XI, Pasal 17 berbunyi:

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi.

Jumlah sekolah dan murid pada masa 10 tahun sesudah kemerdekaan (tahun 1955) dibanding dengan pada masa sebelum kemerdekaan (tahun 1939/1940) mengalami peningkatan cukup pesat. Murid SD mengalami kenaikan 33 kali, murid SMP dan SMA 24 kali, perguruan tinggi 14 kali. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya dorongan masyarakat untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan yang selama masa penjajahan tidak terlayani, juga karena adanya perhatian pemerintah untuk mengembangkan pendidikan. Kemudian pada akhir Repelita I jumlah murid SD mengalami perkembangan pesat, yaitu 54 kali sedangkan pada akhir pelita V 14 kali dari jumlah murid pada saat tahun sesudah proklamasi.

Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat derap pembangunan.

Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Hal ini akan dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan.

Khusus untuk pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap-tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap-tiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan Valitatif serta relevansi yang selalu ditentukan proyeksinya secara terus menerus dengan saksama.

Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif.

Cara konvensional antara lain:

- a) Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres dan atau ruangan belajar.

- b) Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan sore).
Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat/ keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.

Cara inovatif antara lain:

- a) Sistem Pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau Impacts System (Instructional Management by Parent, Community and, Teacher). Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.
- b) SD kecil pada daerah terpencil.
- c) Sistem Guru Kunjung.
- d) SMP Terbuka (ISOSA In School Out off School Approach).
- e) Kejar paket A dan B
- f) Belajar jarak jauh, seperti universitas terbuka

1. Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja (performance test). Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan/ pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan.

Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah: Apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warganegara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Dengan kata lain apakah keluaran itu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti itu disebut nurturant effect. Meskipun disadari bahwa pada hakikatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan sendiri.

Tetapi jika terhadap produk seperti itu sistem pendidikan dianggap mempunyai andil yang cukup, yang tetap menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu

produk tersebut tidak mudah. Berhubung dengan sulitnya pengukuran terhadap produk tersebut maka jika orang berbicara tentang mutu pendidikan, umumnya hanya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil EBTA. Ebtanas, atau hasil Sipenmaru, UMPTN (yang biasa disebut instructional effect), karena ini yang mudah diukur. Hasil EBTA dan lain-lain tersebut itu dipandang sebagai gambaran tentang hasil pendidikan.

Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik. Tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar. Seberapa besar dukungan tersebut diberikan oleh komponen pendidikan, sangat tergantung kepada kualitas komponen dan kerja samanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Sebagai contoh, misalnya komponen sarana pembelajaran yang lengkap tetapi tidak didukung oleh guru-guru yang terampil maka sumbangan sarana tersebut pada pencapaian tujuan tidak akan optimal. Tentang hal ini sudah dipaparkan secukupnya pada butir terdahulu yaitu tentang sistem pendidikan.

Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam Tap MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa utik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan leknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. (BP-7 Pusat. 1989: 68.) Umumnya kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air (kota dan desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

b. Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan (utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, dan komponen masukan instrumental) serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan.

Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut:

- a) Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.
- b) Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain.
- c) Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan mengairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP
- d) Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar.
- e) Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.
- f) Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
- g) Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:
 - 1) Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.
 - 2) Supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas.
 - 3) Sistem ujian nasional/negara seperti Ebtanas, Sipenmaru/UMPTN.
 - 4) Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.

c. Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah:

- a) Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan.
- b) Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan.
- c) Bagaimana pendidikan diselenggarakan.
- d) Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga.

Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok te- yang sangantara stok te masa 5 tahun terakhir ini jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga di lapangan. Sedangkan persediaan yang siap diangkat (untuk ada bidang studi tertentu yang belum tersedia tenaganya) lebih besar daripada kebutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini berarti pemubaziran terselubung, karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar kembali melalui pengabdian (belum terjadi rate of return). Se- bab tenaga kependidikan khususnya guru tidak dipersiapkan untuk berwirausaha.

Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga pada sekolah-sekolah tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya, misalnya guru bahasa harus mengajar IPA.

Gejala tersebut membawa ketidakefisienan dalam memfungsikan tenaga guru, juga pada SD, meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, namun mengalami masalah penempatan karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, karena tidak ada insentif yang menarik, demikian pula sulitnya menempatkan guru wanita.

Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan. Dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan (yang berupa penyuluhan, latihan, lokakarya, penyebaran buku panduan) sangat lambat. Padahal

proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat dicanangkan berlakunya kurikulum dengan Saat mulai dilaksanakan. Dalam masa transisi yang relatif lama ini proses pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif.

d. Masalah Relevansi Pendidikan

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi

Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut:

Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.

Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada ialah siap kembang peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia.

Bagaimana gambaran relevansi pendidikan itu dengan kebutuhan lapangan?

Umumnya luaran yang diproduksi oleh sistem pendidikan (lembaga yang menyiapkan tenaga kerja) jumlahnya secara kumulatif lebih besar daripada yang dibutuhkan di lapangan. Sebaliknya ada jenis-jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi.

2. Problematika Aktual Pendidikan dan Penanggulangannya

Pendidikan selalu menghadapi masalah, karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.

Permasalahan aktual berupa kesenjangan- kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi.

Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan.

Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis (merupakan penjabaran undang-undang pendidikan) dan secara psikologis (berdasarkan hukum perkembangan peserta didik) atau tidak. Penjurusan yang berlaku cepat pada SMA misalnya, dianggap tidak mendasarkan Sej pada proses kematangan anak. Konsep seperti itu bermasalah Selanjutnya jika suatu kurikulum sudah cukup andal, dapat dilaksanakan apa tidak. Jika tidak, timbullah masalah pelaksanaan atau masalah operasional. Misalnya pendidikan tentang Pendidikan Moral Pancasila yang tekanannya pada pendidikan afektif, ternyata dalam pelaksanaannya menjadi pelajaran tentang pengetahuan Pancasila (meng-kognitifkan yang afektif), ini adalah contoh masalah operasional.

Perlu dipahami bahwa tidak semua masalah aktual tersebut merupakan masalah baru. Bahkan ada yang sudah lama. Sudah sejak lama masalah aktual itu kita sepakati untuk mengatasinya, tetapi dari tahun ke tahun hasilnya tetap sama. Contoh Pendidikan Moral Pancasila seperti yang telah diungkapkan tadi. Berikut ini masalah aktual tersebut akan dibahas satu persatu.

a. Masalah Keutuhan Pencapaian Sasaran

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi secara rinci di dalam GBHN butir 2a dan b, tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan secara vertikal (dengan Tuhan Yang Maha Esa), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan konsentris (dengan diri sendiri); yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Jadi konsepnya sudah cukup baik. Tetapi di dalam pelaksanaannya pendidikan afektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Pendidikan agama dan Pendidikan Moral

Pancasila misalnya yang semestinya mengutamakan penanaman nilai-nilai bergeser kepada pengetahuan agama dan Pancasila. Keberhasilan pendidikan dinilai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan. Pengembangan daya pikir dinomorsatukan, sedangkan pengembangan perasaan dan hati terabaikan. Padahal untuk pengembangan perasaan dan hati agar memahami nilai-nilai tidak cukup hanya berkenalan dengan nilai-nilai melainkan harus mengalaminya. Dengan mengalami peserta didik dibuka kemungkinannya untuk menghayati hal-hal seperti kepercayaan diri, kemandirian, keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap waktu dan kerja, kegairahan belajar, kedisiplinan, kesetiakawanan sosial, dan semangat kebangsaan

Masalahnya, apakah sistem pendidikan kita memberi peluang demi Verjadinya pengalaman-pengalaman tersebut. Kelihatannya banyak hambatan yang harus dihadapi, antara lain:

- 1) Beban kurikulum kurikulum sudah terlalu sarat.
- 2) Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap menjadi bagian dari tersembunyi (hidden curriculum) yang Keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Jika terjadi perubahan tingkah laku afektif maka semata-mata adalah hasil atau dampak dari proses pengiring dan bukan dampak langsung dari proses pembelajaran yang didesain.
- 3) Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.
- 4) Menilai hasil pendidikan afektif tidak mudah. Bahkan kalau mau berhasil, juga membutuhkan biaya. Misal, jika PR ingin berdaya mendidik (ketekunan, kepercayaan diri, kejujuran, kedisiplinan) maka harus diperiksa dengan saksama oleh guru dan hasilnya dikembalikan kepada siswa untuk dibicarakan. Untuk itu perlu ada insentif bagi guru.

Di sinilah letak masalahnya jika sasaran pendidikan yang utuh ingin dicapai.

b. Masalah Kurikulum

Pada bagian ini akan dibahas masalah aktual mengenai kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal

dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi mereka yang ingin lanjut). Kedua macam bekal tersebut seyogianya sudah mulai diberikan sejak dini Benih-benihnya sudah ditanam sejak masa prasekolah dan SD, kemudian dasar-dasarnya sudah diperkuat pada SD. Pada saat itu pendidikan 3R'S (reading, writing, dan arithmetic) memegang peranan penting karena penguasaan 3R'S yang baik menjadi dasar yang kukuh untuk perkembangan selanjutnya. Sampai dengan akhir pendidikan dasar kedua macam bekal dasar tersebut (bekal dasar keilmuan dan bekal kerja) sudah harus dikantongi baik bagi mereka yang akan belajar lanjut maupun bagi mereka yang akan terjun ke masyarakat. Saat ini sistem pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum 1984 (SK No. 0209/U/1984) yang didesain sebagai penyempurnaan kurikulum 1975/76. Jika kurikulum 1975/76 berorientasi kepada produk pendidikan dan kurang membenahi proses pembelajaran maka kurikulum 1984 lebih peduli terhadap kualitas proses pembelajaran. Untuk itu kurikulum 1984 memberi perhatian yang besar pada CBSA dan keterampilan proses, juga pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dengan memperhitungkan hasilnya untuk nilai akhir. sebagai bahan mengundang banyak masalah. Titik rawan yang bisa timbul antara lain lapangan khususnya guru agar dapat ber-CBSA dan melaksanakan Beterampilan proses dalam pembelajaran. Ini bukan persoalan yang mudah, karena merupakan soal perubahan sikap dan keterampilan dalam pembelajaran. Pembengahannya memerlukan penataran, penyuluhan, bimbingan secara kontinu dari para pembina pendidikan serta tenaga ahli, kesemuanya itu berarti beban biaya.

Jika bicara soal penataran, di samping persoalan biaya yang tidak sedikit juga persoalan waktu, karena untuk dapat menjangkau semua guru yang jumlahnya demikian besar memerlukan waktu puluhan tahun.

Penelitian yang dilakukan di salah satu provinsi (Sulawesi Selatan) tahun 1993 tentang CBSA *) (yang berarti sesudah 9 tahun konsep CBSA dicetuskan) menunjukkan bahwa belum ada kesatuan bahasa tentang CBSA di kalangan guru kepala sekolah dan penilik. Bukan tidak mungkin pada beberapa provinsi lain keadaannya juga sama. Kuncinya terletak pada guru sebagai "the man behind the tool" dalam proses pembelajaran. Tetapi karena CBSA merupakan gerakan baru proses pembelajaran, maka kepala sekolah dan penilik/pengawas dituntut keaktifan peran sertanya.

Kemudian konsep tentang ko dan ekstra kita di samping yang kurikuler secara terpadu dan terprogram, adalah pula konsep yang bagus dan mendasar karena di samping

mengaitkan kualitas pendidikan afektif juga menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan masyarakat yang selama ini membelenggu sekolah sehingga asing dari masyarakatnya. Tetapi pelaksanaan konsep tersebut secara sungguh-sungguh, berarti tambahan beban bagi guru yang dengan kondisi guru seperti dewasa ini adalah sulit untuk dipenuhi. Kecuali jika insentif guru yang berkaitan dengan itu diperhitungkan.

Konsep kurikulum 1984 juga memiliki kelebihan karena adanya keluwesan-keluwesannya antara lain:

1. Disediakkannya aneka program belajar, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk memasuki lapangan kerja.
2. Adanya program inti yang sifatnya nasional untuk persatuan nasional, memuat pengetahuan minimal dan program khusus A dan B dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
3. Adanya program pusat dan program daerah (muatan lokal).

Konsep yang luwes tersebut cukup baik dan ideal. Dalam pelaksanaannya mengandung banyak kerawanan. Dengan disediakan aneka program belajar berarti sekolah menengah berfungsi ganda, sebagai sekolah umum sekaligus juga sebagai sekolah kejuruan. Kondisi demikian menimbulkan masalah personil khususnya tenaga pengajar, pengorganisasian, fasilitas, administrasi, dan biaya.

Lebih rawan lagi adalah soal program khusus A dan B. Program A memberikan bekal untuk lanjut studi ke perguruan tinggi sedangkan program B memberikan bekal untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Ternyata dalam prakteknya yang terlaksana hanya program A. Program B tidak terlaksana karena kondisi sekolah pada umumnya tidak memungkinkan.

Masalah yang muncul dari keadaan tersebut ialah tanpa sengaja kurikulum 1984 menggiring peserta didik untuk beramai-ramai (karena desakan keadaan) memasuki perguruan tinggi, tanpa melihat secara potensial mampu atau tidak. Tentu saja dengan segala konsekuensinya setelah berada di perguruan tinggi.

Khususnya bagi mereka yang sebenarnya tidak mampu, pemaksaan diri karena arus itu berarti pembiasaan citra diri, dan dilihat dari segi aset nasional merugikan pembiasaan modal pembangunan, dalam bentuk sumber daya manusia.

Satu segi lagi yang cukup modern dari kurikulum 1984 ialah adanya program daerah (di samping program pusat) yang dikenal sebagai muatan lokal. Program ini

mengantisipasi hari depan pendidikan yang mengarah kepada desentralisasi. Dengan desakan konsep muatan lokal akan semakin menempati posisi penting dalam kurikulum pendidikan (H.A.R. Tilaar, 1992; 8).

Sekalipun demikian tetap disadari bahwa pelaksanaan kurikulum ini tidak mudah dan cukup rumit. Di sinilah letak masalahnya.

Kerumitan-kerumitan itu antara lain, meliputi:

- a) Pemilihan materi muatan lokal yang tepat.
- b) Penyusunan program (disajikan secara monolitik atau secara integratif), juga menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, dari dalam dan dari luar lingkungan sekolah.
- c) Koordinasi pelaksanaan.
- d) Penyediaan sarana, fasilitas, dan biaya.

Semuanya itu menuntut keterampilan dari para pelaksana dan pembina pendidikan di lapangan yang harus bergerak sebagai tim dengan ditunjang kemauan yang besar sebagai tekad bersama. Hambatan yang besar dari pemecahan terhadap konsep tersebut adalah bagai- mana memasyarakatkannya di kalangan para pelaksana pendidikan di lapangan

c. Masalah Peranan Guru

Konsep-konsep baru lahir sebagai cerminan humanisme yang memberikan arah baru pada pendidikan. Sejalan dengan itu perkem- bangan iptek yang pesat menyumbangkan cara-cara baru yang lebih mantap terhadap pemecahan masalah pendidikan. Dalam realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan. Sejalan dengan itu maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah.

Dahulu sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruangan tempat belajar dengan beberapa sajadi pusat lunya. Guru fuaerupakan satu-satunya sumber belajar, ia menjadi pada tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru belum berkembang, cakupannya masih terbatas. Kebutuhan hidup dewasa ini juga masih sederhana. Dewasa ini berkat perkembangan iptek yang demikian pesat bahkan merevolusi, sejak abad ke-19, bagi seorang guru tidak mungkin lagi menguasai seluruh khasanah ilmu pengetahuan walau dalam bidangnya sendiri yang ia tekuni. Dia tidak mungkin menjadikan dirinya gudang ilmu dan oleh karena itu juga tidak

satu- satunya sumber belajar bagi muridnya. Tugasnya bukan memberikan ilmu pengetahuan melainkan terutama menunjukkan jalan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan mengembangkan dorongan untuk berilmu. Dengan kata lain menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya meneliti untuk menemukan sesuatu (scientific curiosity) pada diri muridnya. Dengan singkat dikatakan tugas guru adalah “membelajarkan pelajar”.

Guru mendudukan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Beraneka ragam sumber belajar yang hanya justru dapat ditemukan di luar diri guru seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, toko buku, berbagai media massa, lembaga-lembaga sosial, orang-orang pintar, kebun binatang, alam dan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sebagaimana Comenius pernah mengingatkan bahwa alam ini adalah buku besar yang sangat lengkap isinya.

Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor (guru BP), pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Dengan hadirnya petugas-petugas lain tersebut di samping guru maka sejumlah kesibukan yang semestinya tidak dilakukan (tetapi yang selama ini dianggap) dapat dialihkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa ia lalu kehilangan fungsi. Justru sebaliknya fungsinya bertambah banyak hanya bergeser ke arah lain. Kini ia memiliki cukup waktu untuk mengerjakan hal-hal yang semestinya ia lakukan, tetapi yang selama itu tertelantarkan lantaran ketiadaan waktu karena terpaksa menanggulangi kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang lain tadi. Sekarang kecukupan waktu dapat digunakan untuk:

Melakukan kontak dan pendekatan manusiawi yang lebih intensif dengan murid-muridnya. Pelayanan kelompok dan individual dalam bentuk memperhatikan kebutuhan individual/kelompok, mendorong semangat untuk maju berkeaktivitas, dan bekerja sama, menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri dan tanggung jawab, menghargai waktu Dan kedisiplinan, menghargai orang lain, dan menemukan jati diri. Inilah sisi pendidikan dari tugas seorang guru yang telah lama terabaikan. Dari sisi pembelajaran ia diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran (sebagai manajer), menunjukkan tujuan pembelajaran (director), mengorganisasikan kegiatan pembelajaran (koordinator), mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar (komunikator), menyediakan

dan memberikan kemudahan-kemudahan belajar (fasilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator).

Dalam hubungan dengan multiperan guru seperti dikemukakan di atas maka masalah yang timbul ialah bagaimana guru dapat melakukan multiperan seperti itu jika pada kebanyakan sekolah mereka adalah pejuang tunggal. Kalaupun seandainya ia sudah didampingi oleh petugas yang lain seperti konselor dan lain-lain, sudahkah ia memiliki wawasan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan multiperannya itu. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan guru belum siap untuk berbuat demikian.

d. Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun

Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar.

Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Dilihat dari segi lamanya waktu belajar pada pendidikan dasar Yaitu 9 tahun (yang di dalam GBHN 1993 butir 2c dinyatakan sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun), kita sudah mengalami langkah maju dibanding dengan masa-masa sebelumnya yang menetapkan wajib belajar hanya 6 tahun yaitu sampai tingkat SD. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan-ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan, antara lain:

a) Untuk memasuki PJPT II diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Pendidikan dasar akan memperkuat fungsinya sebagai akar tunjang yang menopang kualitas proses pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang selama ini posisinya sangat lemah. Sebelum ini SD selalu kehilangan guru yang berkualitas, sebab hampir semua guru-guru SD yang telah berhasil menatar diri menjadi sarjana berusaha pindah mengajar pada sekolah menengah ataupun perguruan tinggi, karena formasi kenaikan golongan di SD bersifat tertutup. Sekarang formasi sudah terbuka, (Keputusan Menpan No. 26/Menpan/1986) sehingga dapat tetap mengabdikan pada sekolah dasar.

Persyaratan kerja yang dituntut dunia kerja semakin meningkat sehingga dengan basis pendidikan dasar 9 tahun tentunya lebih baik daripada hanya 6 tahun. Khususnya persyaratan usia, usia tamat pendidikan dasar semakin mendekati usia kerja menurut peraturan Menaker No: Per-01/Men/1987, Pasal 1 tentang batas umur layak kerja yaitu 14 tahun.

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, lebih-lebih pada tahap awal sudah pasti banyak hambatannya, hambatan tersebut ialah:

- 1) Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP No. 28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya dengan PP No. 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar. Karena PP tersebut belum dicabut, (H.A.R. Tilaar, 1992: 21).
- 2) Kurikulum yang belum siap. Jika dalam tahun 1994 ini kurikulum tersebut sudah dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah, tentunya sarana penunjang lainnya seperti juklak, buku-buku, dan fasilitas lainnya masih harus ditunggu lagi.
- 3) Pada masa transisi para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain.

Hambatan lain berasal dari sambutan masyarakat, utamanya dari orang tua/kalangan yang kurang mampu. Mereka mungkin cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya karena harus membiayai anaknya lebih lama. Padahal tidak dapat berharap banyak dari anaknya untuk segera memperoleh pekerjaan setelah tamat dari sekolah.

b) Upaya Penanggulangan

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah- masalah aktual seperti telah dikemukakan pada butir 1, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindak- lanjuti dengan menyebarkan buku panduannya kepada sekolah- sekolah. Dalam hubungan ini pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diberi perhatian khusus sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan.
- 2) Pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian insentif bagi guru.

- 3) Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi.
 - a. Oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan akreditasi terhadap PTS diperketat.
- 4) Pendidikan tenaga kependidikan (prajabatan dan dalam jabatan) perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) perlu ditumbuhkembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru (self sustaining competencies). Pendayagunaan sumber belajar yang beraneka ragam perlu ditingkatkan. Upaya ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah, guru, dan teknisi sumber belajar.
- 5) Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya kepada masyarakat luas perlu diberikan informasi yang sifatnya memperjelas dan persuasif tentang makna dari pendidikan dasar. Realisasi dari pelaksanaan pendidikan dasar ini dilakukan secara bertahap.

KESIMPULAN

Misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, karena itu pendidikan selalu menghadapi masalah. Sebabnya karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang mengundang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul

dalam praktek pendidikan di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu sama lain, faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangannya, permasalahan-permasalahan pendidikan yang aktual dan upaya penanggulangannya ini, diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for Information Office of Educational and Cultural Research and Development Ministry of Education and Culture. 1990 Educational Indicators: Indonesia. Jakarta.
- Depdikbud. 1989. UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Beserta Penjalasannya. Jakarta: Balai Pustaka.
- Director General of Primary and Secondary Education. 1990. Bries Information on Primary and Secondary Education. Jakarta.
- Ditjen Dikti, Depdikbud. 1992. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Jakarta: Depdikbud.
- Henry, Levin M. 1983. Cost Effectiveness A Primer. London: Sage Publications.
- Krathwohl, David R. Dan Bloom, Benyamin S. 1974. Taxonomy of Educational Objectives (Handbook II: Affective Domain). New York: David Mc Kay Co Inc.
- Pigozzi, Mary J dan Cieutat, Victor J. 1988. Education and Human Resources Sector Assessment. Florida State University.
- Santoso, Slamet Iman. 1980. Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdikbud.
- Sjafei, Mohammad. 1979. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Tirtaraharja, Umar. 1990. Laporan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdikbud.
- Tirtaraharja, Umar. 1990. Pengkajian Subsektor Pendidikan Pra-SD dan SD di Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Penelitian Kebijakan). Ujung Pandang: Jarlit Bappeda Tingkat I. Provinsi Sulsel